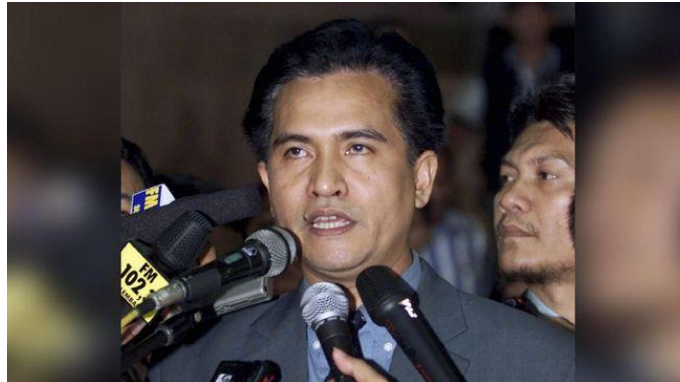


20 TAHUN REFORMASI

Siasat Yusril Jelang Soeharto Terjungkal

Bimo Wiwoho, CNN Indonesia | Senin, 21/05/2018 08:17 WIB



Yusril Ihza Mahendra menjadi salah satu sosok yang berada di lingkaran dalam Soeharto pada hari-hari terakhir menjabat sebagai Presiden RI. (REUTERS)

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Sekretaris Negara Saadilah Mursyid dan tiga bawahannya, yakni Yusril Ihza Mahendra, Bambang Kesowo, dan Sunarto Sudarno tampak gelisah.

Di kediaman Presiden Soeharto, Jalan Cendana, Jakarta, pada 20 Mei 1998 selepas Magrib, mereka memperkirakan rencana pembentukan Komite Reformasi bakal gagal.

Masalahnya, hanya ada tiga dari 45 tokoh masyarakat yang diajak bergabung untuk komite itu bersedia ikut. Padahal, Saadilah menyatakan dalam jumpa pers bahwa susunan awal komite itu akan diumumkan oleh Soeharto keesokan harinya.

"(Saat itu) kita rapat membahas persiapan pembentukan Komite Reformasi," tutur Yusril, kala berbincang dengan CNNIndonesia.com, di Jakarta, Selasa (27/3).

Saat itu, Soeharto memang masih belum berniat untuk turun tahta segera. Dia masih ingin menyelesaikan segala krisis dengan didampingi oleh Komite Reformasi yang bakal dibentuk. Di samping itu, Soeharto juga bertekad membentuk kabinet baru: Kabinet Reformasi.

Keempat pejabat Setneg itu kemudian sepakat menunda pengumuman susunan awal Komite Reformasi. Mereka pun mencoba menenangkan pikiran sejenak.

Yusril meninggalkan rumah Soeharto menuju kediaman Malik Fadjar yang tak jauh dari sana. Tujuannya, makan dan berganti pakaian. Tak dinyana, Yusril bertemu dengan dua

menteri Kabinet Pembangunan VII, yaitu Akbar Tanjung dan Tanri Abeng. Ia kemudian mengonfirmasi soal kabar pengunduran diri para menteri.

"Bang Akbar membuka jaketnya. Dikeluarin surat dalam amplop. Bang Akbar bilang, 'ini surat-surat para menteri sudah mundur. Lihat'," tutur Yusril, menirukan dialognya dengan Akbar.



Akbar Tandjung adalah salah satu dari 14 menteri yang menolak masuk Kabinet Reformasi.

(REUTERS)

Yusril lalu bergegas kembali ke rumah Soeharto. Kepada Saadilah, ia menunjukkan berkas salinan surat yang diterimanya dari Akbar.

Isi surat itu adalah bahwa 14 menteri yang dipimpin oleh Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita menyatakan tidak bersedia diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi yang ingin dibentuk Soeharto.

Saadilah kaget. Keduanya sepakat untuk memberitahukan hal itu kepada Soeharto yang sedang berada di kamarnya.

"Saya bilang [kapada Soeharto ada surat] dari Bang Akbar Tanjung. Pak Harto baca. Dia bilang, 'Ya sudah kalau sudah begini saya mundur saja. Besok saya mundur. Diurus berhentinya bagaimana'," ucap Yusril, menirukan perkataan Soeharto.

Keputusan berhenti itu tak terjadi begitu saja. Dalam buku autobiografi *Soeharto, The Life and Legacy of Indonesia's Second President* karya Retnowati Abdulgani-Knapp (2007), menyebut bahwa tidak bersedianya 14 menteri untuk masuk dalam Kabinet Reformasi, hanya salah satu rangkaian saja.

Rangkaian lainnya adalah demonstrasi di sejumlah kota besar, dugaan kematian sejumlah mahasiswa dalam unjuk rasa, penjarahan dan pembakaran.

"Di Jalan Cendana, Presiden Soeharto akhirnya menyadari bahwa ia telah kehabisan pilihan, sementara semua kekuatan bersatu melawannya," tulis buku tersebut.



Setelah reformasi Yusril Ihza Mahendra (kanan) terpilih menjadi Menkumham dan sempat berbincang dengan Budiman Sudjatmiko yang saat itu masih menjadi tahanan politik. (AFP PHOTO / OKA BUDHI)

Bukan Undur Diri

Malam itu juga, Saadilah dan anak buahnya langsung merancang draf pidato yang akan dibacakan Soeharto. Yusril mengklaim dirinya menyarankan agar pilihan kata saat Soeharto turun dari kursi Presiden bukanlah 'mengundurkan diri', namun 'berhenti'.

Sebab, berdasarkan UUD 1945, pernyataan pengunduran diri Presiden mensyaratkan Sidang Istimewa MPR. Sementara, sidang itu mustahil digelar lantaran Gedung DPR/MPR sedang diduduki ratusan ribu mahasiswa.

"Jadi (Sidang Istimewa MPR) tidak mungkin dilaksanakan," tutur Yusril.

Di sisi lain, kata 'berhenti' merupakan suatu pernyataan sepihak. Maka, jika Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden, maka Soeharto dapat berhenti sebagai presiden tanpa perlu melalui Sidang Istimewa ataupun persetujuan MPR.

Dasar hukumnya ada pada Ketetapan MPR No. VII/MPR/1973 tahun 1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Berhalangan. Usul itu kemudian diakomodasi dalam teks pidato Soeharto.

Selesai merancang draf pidato, Saadilah dan Yusril menyiapkan mekanisme Soeharto berhenti sekaligus mekanisme pengangkatan Wakil Presiden Baharuddin Jusuf Habibie menjadi Presiden.



Sempat ada perdebatan soal keabsahan pengunduran diri Soeharto yang tidak dilakukan di hadapan MPR RI. (REUTERS)

Pada Pasal 2 TAP MPR tersebut diketahui bahwa wakil presiden yang menggantikan disumpah di hadapan Mahkamah Agung sebelum menjabat sebagai presiden.

Pada 21 Mei 1998 dini hari, Yusril menelepon Ketua Mahkamah Agung (MA) Sarwata bin Kertotenoyo. Tanpa banyak bicara, Yusril menyebut Soeharto meminta seluruh jajaran pimpinan MA datang ke Istana, pukul 07.00 WIB. Yusril juga mengingatkan Sarwata agar membawa toga atau pakaian resmi.

"Ya kalau ini perintah Pak Harto, saya datang besok," tutur Yusril, menirukan Sarwata.

Yusril tiba di Istana pada pukul 06.00 WIB, Sarwata dan para pimpinan MA menyusul sejam kemudian. Saat itu, Istana sudah sibuk dengan persiapan pidato Soeharto.

Sarwata, yang belum tahu apa yang akan terjadi, bertanya kepada pihak Istana. Ia kaget mendengar keterangan itu. Dia menemui Yusril. "Tadi malam kok enggak ngomong begitu? Lalu saya disini apa yang bisa saya lakukan?" kata Sarwata.

Yusril mengatakan bahwa pimpinan Mahkamah Agung lainnya hanya perlu menyaksikan Soeharto berpidato berhenti sebagai presiden. Setelah itu, Sarwata dan sesama pimpinan MA harus menyaksikan Habibie mengucapkan sumpah sebagai Presiden. Sarwata risau soal konstitusionalitas.

Di samping itu, ia belum menyiapkan referensi hukumnya. Yusril kemudian menyodorkan telepon. Di ujung sana, guru hukumnya, (almarhum) Ismail Suny berbicara pada Sarwata. Ismail meyakinkan Sarwata bahwa tahapan yang dilaksanakan sah dan konstitusional dan memiliki dasar hukum dalam TP MPR.

"Ini kalau enggak benar, habis ini kami pimpinan Mahkamah Agung. Saya pegang kepada

bapak dan Pak Ismail Suny'," ujar Sarwata kepada Yusril.



BJ Habibie ketika disumpah sebagai Presiden RI ke-3 di Istana Negara, 21 Mei 1998. (REUTERS)

Sarwata dan pimpinan MA lainnya segera mengenakan toga. Sarwata, kata Yusril, masih nampak gugup menghadapi situasi saat itu. "[Sarwata] pakai toga itu terbalik, itu saking paniknya," seloroh Yusril.

Soeharto kemudian membacakan pidato yang menyatakan bahwa ia berhenti.

"Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998," ucap Soeharto. (arh/asa)